

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara umum, kondisi politik di Jambi pasca-reformasi ditandai oleh peralihan dari sistem otoritarian ke sistem yang lebih demokratis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik, serta tantangan baru dalam hal desentralisasi dan dinamika politik lokal. Meskipun ada kemajuan dalam hal kebebasan berpolitik, politik dinasti, korupsi, dan ketegangan sosial tetap menjadi isu yang perlu dihadapi dalam pembangunan politik di provinsi ini.

Pada masa reformasi, persiapan Pemilu di Kota Jambi mengalami perubahan signifikan yang mencerminkan pergeseran menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan langsung. Pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca-Orde Baru, memulai perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk di Jambi. Masyarakat Kota Jambi mulai merasakan pentingnya hak suara mereka, dan partisipasi politik semakin meningkat. Namun, tantangan seperti politik uang, politik dinasti, dan pendidikan pemilih masih menjadi isu yang harus terus dihadapi dalam proses demokrasi yang berkembang.

Pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi pada masa reformasi mencerminkan pergeseran besar dalam sistem politik Indonesia, dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi pada masa reformasi mencerminkan transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka, meski masih ada

tantangan yang perlu diatasi. Pemilu yang dilaksanakan dengan sistem multipartai dan Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam proses politik. Meskipun masih ada tantangan seperti politik uang, politik dinasti, dan keterbatasan pendidikan politik, pemilu di Kota Jambi pada era reformasi menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, serta menguatnya peran media dan lembaga pengawas. Di masa depan, penguatan kualitas demokrasi, pendidikan politik yang lebih baik, dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci dalam memastikan Pemilu di Kota Jambi dapat berjalan dengan adil dan berkualitas. Pemilu 1999 dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam format memilih partai politik, bukan calon legislatif individu. Sistemnya Proporsional tertutup rakyat mencoblos simbol partai, bukan nama calon. Pemilu 2004 di pilih langsung oleh rakyat partai dan individu calon legislatif. Sistemnya Proporsional terbuka rakyat mencoblos nama caleg langsung.